IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI (PRSE) DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

JURNAL

RITNO W. HUBU
NIM : D02416129

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2020

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI (PRSE) DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

[1]Ritno W. Hubu, [2] Widya Kurniati Mohi, [3]Sri Hantuti Paramata
[1)]Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo
[2.3)] Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2020
Email : rritnohubu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber datanya adalah sumber data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan analisa dokumen. Untuk keabsahan data teknik yang digunakan adalah triangulasi data atau sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh bantuan PRSE terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Namun pengaruhnya belum mampu mendongkrak secara signifikan tingkat kemiskinan dikarenakan tidak adanya proses pendampingan lebih lanjut bagi PRSE pasca menerima bantuan.

Keywords: Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

ABSTRACT

This study aims to obtain an overview of Economic Social Prone Women in Limboto Sub-District, Gorontalo Regency. Women who are prone to socio-economics are increasing ever year. This research uses a qualitative research approach, with a descriptive type of research. The data sources are primary and secondary data sources. The data collection techniques used interviews, observation, documentation and document analysis. For the validity of the data, the techniques used triangulation of data or sources and triangulation of menthods. The results showed that there was an Influence of economic social prone women assistance on reducing poverty in Gorontalo regency. However, the impact has not been able to significantly increase the level of poverty due to the absence of any further assistance process for the economic social prone women after receiving assistance.

Keywords: Economis Social Prone Women

PENDAHULUAN

Kesejahteraan perempuan wajib menjadi agenda penting dalam program pengentasan kemiskinan karena kesejahteraan perempuan pada umumnya bisa mencerminkan kesejahteraan keluarga dan dapat menjadi jaminan bagi kesejahteraan golongan PMKS lainnya, yaitu anak jalanan, lanjut usia, dan anggota keluarga yang menderita penyakit lainnya. Terkait dengan peranan reproduktif yang melekat pada kaum perempuan. Moser, 1989 (dalam Fauzia dan Prasetyaningsih, 2005) menyatakan bahwa peranan reproduktif adalah peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestik yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan keluarga, contohnya: memasak, memelihara rumah, memelihara dan mengasuh anak dan anggota keluarga lainnya.

Dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, Dinas Sosial mengelompokkan penduduk yang menjadi target, salah satunya adalah kelompok penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan. Salah satu jenis PMKS adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) selain Lanjunt Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Pemulung, dan sebagainya. Definisi PRSE menurut Departemen Sosial (Depsos) RI, PRSE adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun yang menikah atau belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau istri yang ditinggal suaminya tanpa batas waktu. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) merupakan salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Rumah tangga yang dikepalai wanita biasanya miskin karena pendidikannya rendah, akses terbatas terhadap pekerjaan, pelayanan sosial, sumber produksi, modal, kredit dan tanah serta memiliki sedikit jaringan kekerabatan yang mendukungnya (Clark, 1986 dalam Harini dan Listyaningsing, 2000). Dubois (2015) menyatakan bahwa terkonsentrasinya kemiskinan diantara perempuan, terutama perempuan yang menjadi kepala rumah tangga terkait dengan rendahnya pendapatan mereka dibandingkan dengan laki-laki yang disebut sebagai feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*). Idris dan Selvaratnam (2012) menyebutkan bahwa insiden kemiskinan baik secara relatif atau absolut adalah tinggi di kalangan wanita terutama bagi wanita yang menjadi kepala rumah tangga. Bagi wanita yang bercerai hidup atau mati, mereka bisa menjadi miskin

jika terpaksa menanggung anak tanpa penghasilan atau harta yang ditinggalkan.

Namun demikian, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah wanita miskin tidak dapat dicapai hanya dengan program ekonomi karena adanya nilai-nilai sosial seperti peranan reproduktif yang melekat pada kaum perempuan (misalnya: merawat anak, pekerjaan rumah tangga).

Dengan kondisi seperti ini, diprediksi isu-isu kesejahteraan sosial akan semakin berkembang, karena terjadi benturan kepentingan di antara aspek kehidupan manusia. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin menjelaskan antara lain bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, memeperoleh pelayanan keseharan, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan beruhasa.

Hasil studi awal peneliti bahwa di Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) angka kemiskinan menunjukkan stagnasi penurunan, namun masih tertinggi se Provinsi Gorontalo (BPS, 2015). Oleh karena itu kondisi kemiskinan di Kabupaten Gorontalo perlu perhatian serius, hal ini disebabkan oleh proporsi penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan di daerah ini (21,05%) berada di atas Provinsi Gorontalo (17,41%) dan jauh di atas target penurunan proporsi penduduk miskin nasional (10,96%) dan target MDGs (7,75%). Oleh karena itu untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan diperlukan upaya sistematis yang bersifat komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya tersebut akan mampu menyentuh setiap elemen masyarakat miskin.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan dan serta Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 712 tahun 2016 tentang Penetapan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo bahwa jumlah rumah tangga dengan cluster sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin di Kabupaten Gorontalo sebanyak 44.734 rumah tangga atau sebanyak 192.689 individu. Data kemiskinan yang telah ditetapkan itu merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak

mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriteria baku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk kategori Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah: 1) perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun, 2) istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan; 3) menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan 4) berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

Data hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) secara umum di Kabupaten Gorontalo tahun 2017 berjumlah 75 orang dan tahun 2018 berjumlah 60 orang. Khusus untuk Kecamatan Limboto data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi tahun 2017 berjumlah 25 orang dan untuk tahun 2018 program ini diarahkan kepada kecamatan yang belum memperoleh bantuan.

Purnama, A., 2018. Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dilakukan di Desa Triwidadi, Kecamatam Pajangan, Kabupaten Bantul. Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan (1) Membentuk kelompok sosial usaha ekonomi produktif sebagai wahana atau ruang jejaring/kerjasama yang dapat diakses untuk pengembangan prakarsa/inivasi. (2) Memberi bimbingan motivasi, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan yang didalamnya termasuk bimbingan kewirausahaan dan inovasi. Penelitian ini berfokus pada cara menanggulangi/mencegah terjadinya kemiskinan.

Fajarina, 2018. Perilaku Komunikasi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Di Kota Bandung. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perilaku komunikasi Kaum Miskin dengan lingkungannya.

Ikhsan. R. M., 2015, Implementasi Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program bansos UEP yang dilaksanakan oleh Dinsos Provinsi Kepri yang bekerja sama dengan Dinsosnaker Kota Tanjungpinang dalam proses pemberdayaan sosial keluarga miskin tahun 2013 di Kota Tanjungpinang.

Fokus Masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana gambaran implementasi kebijakan program Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Limboto Kabupten Gorontalo.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan program Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Limboto Kabupten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Moleong (2012: 11) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata–kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Usman dan Purnomo (2009: 129) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Lokasi penelitian implementasi kebijakan program Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) adalah di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dan Kantor Camat Limboto.

Alasan pengambilan lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Gorontalo adalah salah satu kabupaten yang telah memprogramkan bantuan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sehingga dalam pengumpulan data agak mudah. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu Bulan September sampai dengan oktober 2019.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dari beberapa sumber yang antara lain :
Data primer Dan Data sekunder Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian indikator keberhasilan terletak pada sejauh mana program itu masih dilaksanakan, di samping program dapat merubah dan meningkatkan usaha yang dikembangkan serta program ini dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sementara itu untuk mengukur seberapa besar keberhasilan program PRSE ini bukan wewenang Dinas Sosial tetapi semuanya adalah hasil survey dari BPS Kabupaten.

Sumber daya pengelola yang berperan aktif dalam mengola program PRSE di Kecamatan LImboto adalah sumber daya yang profesional, dimana pengelola program ini telah mendapatkan pelatihan-pelatihan. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah Dinas Sosial, pihak Kecamatan, dan Kelurahan sehingga dapat dikatakan bahwa pengelola program PRSE di Kecamatan Limboto adalah sumber daya yang profesional. Karakeristik agen pelaksana program PRSE di kecamatan limboto melibatkan seluruh stackhoder yang meliputi Dinas Sosial, pengamping, pihak kecamatan, kelurahan, penerima manfaat, serta LSM , sehingga program ini benar-benar bukan merupakan orang perorang tetapi milik seluruh masyarakat.

Karakeristik agen pelaksana program PRSE di kecamatan limboto melibatkan seluruh stackhoder yang meliputi Dinas

Sosial, pengamping, pihak kecamatan, kelurahan, penerima manfaat, serta LSM , sehingga program ini benar-benar bukan merupakan orang perorang tetapi milik seluruh masyarakat. Program bantuan PRSE di Kecamatan Limboto ini sudah sesuai dengan prosedur yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, sehingga bantuan ini benar diperutukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada pelaksanaan program ini benar-benar disadari bahwa komunikasi sangat penting, baik komunikasi formal maupun komunikasi non formal guna terjalinnya hubungan baik antara seluruh unsur pelaksana kegiatan program PRSE di Kecamatan Limboto. Komunikasi yang dilaksanakan yaitu dalam bentuk pertemuan-pertemuan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.

Temuan hasil penelitian menggabarkan bahwa rata-rata informan menyatakan bahwa setelah menerima program ini pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat, begitu pula halnya dengan kehidupan sosial penerima bantuan berubah kearah yang lebih baik, sementara itu dalam proses pemberian bantuan ini tidak dipengaruhi oleh partai politik manapun.

Permasalahan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) jika tidak ditangani secara baik, dikhawatirkan nantinya akan menyebabkan munculnya problem sosial baru seperti prostitusi, kemiskinan, keterlantaran, balita terlantar, gizi buruk, kriminalitas, gelandangan, pengemis dan sebagainya.

Permasalahan sosial PRSE ini menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi pada aspek efektifitas bantuan yang telah diberikan pemerintah.

Gambaran tentang Implementasi Kebijakan Program Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Gambaran implementasi kebijakan program PRSE di Kecamatan Limboto untuk indikator ukuran dan tujuan kebijakan terletak pada sejauh mana program itu masih dilaksanakan, di samping itu program telah dapat merubah dan meningkatkan usaha yang dikembangkan oleh PRSE sehingga program ini dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini sejalan dengan pendapat Agustino (2008:141-144) bahwa Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan- hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud di sini adalah Dinas Sosial, pihak Kecamatan, dan Kelurahan sehingga dapat dikatakan bahwa pengelola program PRSE di Kecamatan Limboto adalah sumber daya yang profesional. Hal ini sesuai dengan pendapat Agustino (2008:141-144) bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakeristik agen pelaksana program PRSE di Kecamatan Limboto melibatkan seluruh stackhoder yang meliputi Dinas Sosial, pengamping, pihak kecamatan, kelurahan, penerima manfaat, serta LSM , sehingga program ini benar-benar bukan merupakan orang perorang tetapi milik seluruh masyarakat.

Perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan (Agustino, 2008:141-144).

Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana

Program bantuan PRSE di Kecamatan Limboto ini sudah sesuai dengan prosedur yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, sehingga bantuan ini benar diperutukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Berkenaan dengan ini Agustino (2008:141-144) menyatakan bahawa sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi yang dilaksanakan yaitu dalam bentuk pertemuan-pertemuan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan

Kelurahan. Hal sesuai dengan pendapat Agustino (2008:141-144) bahwa koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Tanggapan masyarakat di lingkungan/lokasi bantuan PRSE kadang kala menimbulkan kecemburuan sosial. Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PRSE merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah kelurahan, hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi tentang keluarga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Sementara dari aspek ekonomi keluarga sasaran mengalami pertumbuhan pendapatan, walaupun masih ada kendala-kendala, namun masyarakat merasa juga terbantukan oleh usaha ekonomi yang dikelola oleh tersebut. Kemudian untuk aspek linkungan politik, memang diakui bahwa bantuan yang diberikan tersebut sering dikaitkan dengan situasi politik yang sementara berlangsung, namun hal ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan karena yang mendapatkan bantuan didasarkan pada data yang telah ada.

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, Agustino (2008:141-144) menyatakan bahwa hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan program bantuan PRSE di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo telah berjalan dengan baik, sehingga ukuran dan tujuan dari kebijakan sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat, Sumber daya pengelola yang berperan aktif dalam mengelola program PRSE di Kecamatan Limboto Kabupten Gorontalo adalah sumber daya yang profesional, dimana pengelola program ini telah dibekali dengan pelatihan-pelatihan, Karakeristik agen pelaksana program PRSE di Kecamatan Limboto Kabupten Gorontalo melibatkan seluruh stackhoder yang meliputi Dinas Sosial, pengamping, pihak kecamatan, kelurahan, masyarakat, serta LSM, sehingga program ini benar-benar bukan merupakan orang perorang tetapi milik seluruh masyarakat.

Program bantuan PRSE di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan prosedur yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, sehingga bantuan ini benar-benar diperutukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada umumnya komunikasi yang terjadi adalah komunikasi formal maupun komunikasi non formal guna terjalinnya hubungan baik antara seluruh unsur pelaksana kegiatan program PRSE di Kecamatan Limboto. Program PRSE di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya penerima bantuan, begitu pula halnya dengan kehidupan sosial penerima bantuan berubah kearah yang lebih baik, sementara itu dalam proses pemberian bantuan ini tidak dipengaruhi oleh partai politik manapun.

Saran

Perlu koordinasi yang lebih baik dan intensif dari berbagai pihak sehingga implementasi kebijakan program berjalan sesuai harapan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penentuan sasaran program sehingga program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya bidang kesejatheraan sosial berjalan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan program PRSE perlu mendapat perhatian khusus dari penentu kebijakan sehingga dapat berjalan maksimal membantu masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Perlu adanya Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat sampai ketingkat paling bawah untuk meminimalisir kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program pemerintah terutama berkenaan dengan PRSE.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, 2008. Analisis Kebijaksaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.

Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan (Apa, Men. gapa, dan Bagaimana). Administrasi Publik, Volume 1 No. 1

Aneta. Asna. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1

Basrowi dan Suwandi. (2008). "Memahami penelitian kualitatif". Jakarta: Rineka Cipta.

Dubois, D., Rucker, D. D., & Galinsky, A. D. 2015. Social Class, Power, andSelfishness: When and Why Upper and Lower Class Individuals Behave Unethically. Journalof Personality and Social Psychology. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/pspi0000008

Dunn, N William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa.dkk.) Yogyakarta: GajahMada University Press.

Edi Suharto, 20015. Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfa Beta, Bandung.

Edi, Suharto. 2005 Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian StrategiPembangunan Kesejahteraan Sosial,Bandung: PT Refika Aditama.

Fajarina, 2018. Perilaku Komunikasi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Di Kota Bandung. Jurnal Komunikologi Volume 15 Nomor 1, Maret 2018

Fajarwati, dkk. 2017. Strategi untuk Mengatasi Permasalahan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Majalah Geografi Indonesia Vol. 31, No.1, Maret 2017 (22- 30) © 2017 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI)

Fausia, L. dan Prasetyaningsih, N. 2005. Gender dalam Kawasan DAS Citanduy. Kajian Aktifitas Reproduktif dan Produktif Perempuan dalam Sumberdaya Alam: Working Paper Proyek Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata Pamong Sumberdaya Alam Kasus DAS Citanduy.

Harini, Rika dan Listyaningsih, Umi. 2000. Perubahan Strategi Bertahan Hidup Wanita Kepala Rumah Tangga di Masa Krisis (Studi Kasus Kecamatan Umbul Harjo Daerah Istimewa Yogyakarta): Majalah Geografi Indonesia.

Ikhsan. R. M, 2015, Implementasi Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin.

Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo

Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE

Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu.Yogyakarta: Gava Media.

Kencana, S.I. 2000. Manajemen Pemerintahan. Pertja, Jakarta.

Kencana. S.I. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Kementerian sosial, 2010. Profil Wanita Rawan sosial Ekonomi (WRSE) Indonesia Berdasar Data Susnas, Jakarta, Kemensos dan BPS

_____, 2011. Data Penyendang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Jakarta, Pusdatin

Koryati, Nyimas Dwi Dkk. 2004. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta: YPAPI.

Moeljarto Tjokrowinoto, 2012. Pengantar Adminstrasi Pembangunan di Era Reformasi, Penerbit Alfabeta, Jakarta.

Moleong, L.J. 2000. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. 2012 .Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nurdin Usman, 2002, Konteks implementasi berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru.

Nurdin, Usman. 2004. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Purnama, A. 2018. Pemberdayaan Wanit Rawan Sosial Ekonomi dilakukan di Desa Triwidadi, Kecamatam Pajangan, Kabupaten Bantul. Jurnal penelitian kesejateraan sosial, terakreditasi lipi. No.607/AU2/P2MI-LIPI/03/2015. p-ISSN:1412-6451. e-ISSN: 2528-0430. Vol.18 Nomor 1 (2019)

Sispa Rini , Lidia and Suparman, Suparman and Desy , Afrita. 2010. Peranan Yayasan 'Aisyiyah Dalam Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (Studi Kasus Majelis Kesejahteraan Sosial Yayasan 'Aisyiyah Bengkulu). Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB

Sanusi, A. 2014. Metodologi penelitian bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Subarsono. AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Suman, Agus. 2007. Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, dan Kemiskinan: Sebuah Studi Empiris. Jurnal Menejemen dan Kewirausahaan, 9(1), 62-72

Sutopo,..H.B. 2002. Metodologi penelitian kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Undang-Undang Nomor 13. 2011. Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Waluyo. 2009. Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah). Bandung: CV. Mandar Maju.

Wirawan. 2011. Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes. Jakarta: Raja Grafindo Persada